



Watik Tri <watic.tk@dsngroup.co.id>

Penjelasan Posisi Terakhir PT PWP atas Permohonan Kebun Masyarakat Tapin Bini

Danar Surya Wiranagara <danar.wiranagara@dsngroup.co.id>

Tue, Oct 6, 2026 at 4:58 PM

To: Aryo Gustomo <aryo.gustomo@rspo.org>, Amir Hamzah Ritonga <amir.ritonga@rspo.org>, sarsongko <sarsongko@rspo.org>

Cc: Teguh Triono <teguh.triono@dsngroup.co.id>, Agus Setiabudi <agus.setiabudi@dsngroup.co.id>, Denys Collin Munang <denys.munang@dsngroup.co.id>, BC MS Agro <ms.agro@dsngroup.co.id>

Jakarta, 7 Oktober 2026

Perihal: Pemuktahiran Data dan Informasi Mengenai Permintaan Lahan di Area HCV PT Pilar Wanapersada (PT PWP) oleh Masyarakat Desa Tapin Bini

Yth. Pak Aryo dan Tim RSPO,

Menindaklanjuti e-mail terakhir yang telah kami sampaikan terkait perkembangan Permintaan Masyarakat Tapin Bini untuk pembukaan Kebun Masyarakat di areal Konservasi Bukit Bolau, bersama ini kami menyampaikan perkembangan dan posisi terkini sebagai berikut:

1. Areal seluas 337,143 Ha yang dimohonkan oleh Masyarakat telah resmi dilepaskan dari areal HGU PT PWP, sebagaimana dokumen pelepasan sebagian hak atas HGU 01/Tapin Bini dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau nomor 1452 Tahun 2026 tertanggal 13 Juli 2026 menjadi:
 - a. Bidang tanah seluas 11.243,047 Ha dalam pengelolaan HGU no. 01/Tapin Bini sebagai HGU PT PWP, dan
 - b. Bidang tanah seluas 337,143 Ha dengan nomor bidang tanah 01733 diluar HGU PT PWP

Dengan demikian, sejak dilakukan pelepasan tersebut, areal dimaksud sudah tidak lagi berada dalam penguasaan maupun pengelolaan PT PWP.

2. Sehubungan dengan perubahan status areal tersebut, PT PWP akan melakukan pembaruan data dan informasi konsesi pada GeoRSPO, sesuai dengan kondisi dan status penguasaan lahan terkini.

3. Sesuai dengan arahan Bupati Lamandau, pengelolaan atas areal yang telah dilepaskan tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab Koperasi Dahas Bolau Sejahtera Kelurahan Tapin Bini. Dengan demikian, segala proses dan kegiatan pengelolaan areal pasca pelepasan berada di luar kewenangan dan penguasaan PT PWP.

4. Meskipun areal tersebut telah dilepaskan dan bukan lagi merupakan bagian dari penguasaan PT PWP, kami tetap berkomitmen untuk mengawal proses yang berlangsung bersama Masyarakat Tapin Bini dan Koperasi Dahas Bolau Sejahtera, khususnya dalam rangka meminimalisir potensi dampak lingkungan dari kegiatan pembukaan lahan. Pengawasan tersebut antara lain mencakup perhatian terhadap sempadan sungai, area dengan lereng terjal, serta potensi kebakaran lahan.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar RSPO dapat mencatat dan memahami bahwa areal seluas 337,143 Ha tersebut telah berada di luar penguasaan dan pengelolaan PT PWP. Oleh karena itu, kondisi dan pengelolaan areal tersebut selanjutnya tidak dapat diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab operasional PT PWP.

6. Selanjutnya, PT PWP juga akan melakukan penyesuaian luasan areal yang dikelola dalam proses sertifikasi RSPO, dengan mengacu pada kondisi dan status lahan terkini.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan pencatatan lebih lanjut. Kami berharap perkembangan ini dapat menjadi dasar yang jelas dalam proses tindak lanjut

bersama, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan pemahaman mengenai status dan tanggung jawab atas areal dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

Salam,

Danar Surya Wiranagara

Management System Department Head

PT. Dharma Satya Nusantara Tbk

Gedung Grha DSN Lt. 3 Jl. Pulo Ayang Kav OR 3

Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930 Indonesia

T: +62 21 4618 135

F: +62 21 4606 942

M: +62 81331461950

E: danar.wiranagara@dsngroup.co.id



HGU NO 01 DESA TAPIN BINI.pdf
9396K